
Sinkretisme Keagamaan: Din Ilahi Sultan Jalaluddin Akbar Sebagai Media Toleransi dan Politik Dinasti Mughal 1560-1605

Mas Rangga Yuda^{1*}, Deny Yudo Wahyudi²

^{1,2}Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

*galibrakasimviandat007@gmail.com

Keywords :

*Sultan Akbar;
Syncretism;
Mughal Dynasty;
Din Ilahi.*

Abstract

Sultan Jalaluddin Akbar the ruler of the Mughals had the concept of Din Ilahi as a form of religious syncretism. Din Ilahi is a teaching of tolerance and religious pluralism which requires all religions to unite under its leadership. However, the concept of the Din Ilahi received a lot of criticism and challenges from Islamic circles, especially in the palace sphere. This article aims to briefly overview religious syncretism with the concept of Din Ilahi from Sultan Jalaluddin Akbar. This article also tries to portray how the concept of the Din Ilahi as a syncretistic thought has received a lot of criticism and challenges from Islamic circles. The method used is the historical research method or Historical Research which consists of four stages. These stages are heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The result found is that the Din Ilahi is not only a religious syncretism but also a political tool of Sultan Akbar in uniting every difference of belief in the Mughal Dynasty. The Din Ilahi in its teachings makes the majority of Muslims discriminated against. The Din Ilahi is considered to have harmed the actual teachings of Islam by mixing various religious teachings.

Kata Kunci :

*Sultan Akbar;
Sinkretisme;
Dinasti Mughal;
Din Ilahi.*

Abstrak

Sultan Jalaluddin Akbar sebagai penguasa Mughal memiliki konsep Din Ilahi sebagai bentuk sinkretisme keagamaan. Din Ilahi merupakan ajaran toleransi dan pluralisme agama yang menghendaki semua agama bersatu dibawah kepemimpinannya. Namun konsep Din Ilahi mendapat banyak kritik dan tantangan dari kalangan Islam khususnya dalam lingkup istana. Artikel ini bertujuan untuk memberikan sedikit gambaran mengenai sinkretisme keagamaan dengan konsep Din Ilahi dari Sultan Jalaludin Akbar. Artikel ini juga berusaha memotret bagaimana Konsep Din Ilahi sebagai pemikiran yang sinkretism mendapat banyak kritikan dan tantangan dari kalangan Islam. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian sejarah atau Historical Rresearch yang terdiri dari empat tahapan. Tahapan-tahapan tersebut yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil yang ditemukan adalah Din Ilahi tidak hanya sebagai sinkretism keagamaan, melainkan juga sebagai alat politik Sultan Akbar dalam menyatukan setiap perbedaan kepercayaan di dinasti Mughal. Din Ilahi pada ajarannya membuat sebagaian besar kalangan muslim terdiskriminasi. Din Ilahi dinilai telah mencederai ajaran Islam yang kaffah dengan mencampuradukkan berbagai ajaran agama.

Article History :

Received : 12 – 1 – 2022

Accepted : 10 – 6 – 2022

PENDAHULUAN

India merupakan suatu wilayah dengan mayoritas penduduknya beragama Hindu dan sebagian lainnya menganut Islam, Buddha, Kristen, Sikh dan Zoroaster (Anwarsyah 2014). Sebagai agama mayoritas, pengaruh Hindu sangat kuat terlebih pada dinasti-dinasti yang tumbuh di India. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi dinasti-dinasti Islam sebagaimana dinasti Mughal yang merupakan dinasti Islam terbesar di India. Dinasti Mughal

mengalami masa keemasan sejak pemerintahan Sultan Jalaluddin Akbar 1560-1605. Berbagai pemikiran revolusioner Sultan Akbar mampu menguasai sebagian besar anak benua di India (Agustina dkk. 2020). Namun terdapat satu hal yang masih menjadi persoalan dasar dalam penyatuan dan penguasaan seluruh India yakni masih banyaknya konflik keagamaan. Disamping itu, Sultan Akbar juga telah membidik cara agar mendapat banyak pengaruh dan perhatian lebih dari kalangan Hindu sebagai agama mayoritas. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi munculnya konsep Din Ilahi sebagai bentuk sinkretisme keagamaan dan bentuk toleransi antar umat.

Sinkretisme keagamaan tentunya lahir pada suatu tempat atau wilayah yang memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Sinkretisme merupakan suatu pemahaman akan perbedaan paham keyakinan untuk mencari keselarasan atau keseimbangan (Ekopriyono 2005). Lebih lanjut Singgih (2000) menjelaskan bahwa sinkretisme merupakan perpaduan beragam kepercayaan yang tidak memperlakukan benar atau salahnya suatu agama. Keberagaman tersebut kemudian menjadi satu entitas yang saling melebur dan menjadi satu aliran atau doktrin baru yang dijalankan. Konsep sinkretisme sebenarnya tidak terlepas dari peran penguasa yang memiliki sejumlah kepentingan baik dari segi sosial budaya maupun dalam hal politik. Sepertihalnya Konsep Din Ilahi yang merupakan bentuk sinkretisme keagamaan dengan memberikan paham pluralism terhadap semua kepercayaan untuk bersatu dan hidup secara rukun.

Sultan Jalaludin Akbar atau dikenal dengan Sultan Akbar The Great menginginkan seluruh tanah Hindustan dapat bersatu dibawah kekuasaan Mughal. Salah satu kebijakan yang kontroversial yaitu ditetapkannya Din Ilahi sebagai undang-undang keagamaan dan doktrin ajaran baru. Dalam corak kehidupan di India, masyarakat tidak diatur melalui undang-undang negara atau dinasti yang berkuasa, tetapi diatur oleh Undang-undang upacara keagamaan yang sangat menjadi dasar hukum dan menjadi patokan hidup masyarakat (Anwarsyah 2014). Hal inilah yang juga menjadi kuatnya peran kaum Brahmana dalam membuat peraturan serta dalam sistim kasta. Kebijakan dan kesewenangan kaum Brahmana juga mendapat tantangan dari umat Hindu yang semakin tertindas. Din Ilahi mencoba menjawab berbagai persoalan keagamaan dengan menjadikannya satu entitas yang tidak dapat dipisahkan. Namun gagasan tersebut mendapat banyak kritik dari berbagai kalangan khususnya umat muslim (Anwarsyah 2014). Toleransi yang sangat berlebihan dalam konsep Din Ilahi dianggap mendiskriminasi dan menciderai agama Raja (Islam). Selain itu banyak juga dari kalangan muslim terutama kalangan istana beranggapan Sultan Akbar telah keluar dari jalur Islam ortodox dan melukai beberapa ajaran keislaman (Agustina dkk. 2020).

Konsep Din Ilahi sebagai bentuk sinkretisme keagamaan tidak terlepas dari dasar, pengaruh dan latar belakang keagamaan dari Sultan Jalaluddin Akbar. Sultan Akbar pada dasarnya menganut agama Islam. Pemikiran-pemikirannya lebih bersifat pluralism dan sangat terbuka terhadap berbagai agama atau aliran keagamaan. Sultan Akbar juga sering mengadakan diskusi-diskusi keagamaan dengan para sufi, pendeta dan brahmana yang diundang langsung ke istana. Namun diskusi yang paling sering dilakukan yaitu dengan golongan sufi yang sebenarnya pada saat itu sufi memiliki pemahaman yang sangat jauh dari Al-Qur'an dan Hadis (Kutlutürk 2016). Terbukti bahwa Sultan Akbar terpengaruh pemahaman dari doktrin kesatuan yaitu *wahdatu-I wujud* (kesatuan keberadaan). Doktrin ini memiliki pemahaman bahwa tunduk dan sujud kepada Raja sama halnya dengan tunduk dan patuh patuh kepada Allah SWT. Selain itu doktrin ini juga memiliki pemahaman bahwa terdapat banyak cara dalam menyembah Allah SWT yang dapat dijadikan suatu landasan beribadah (Kutlutürk 2016). Pengaruh pemikiran inilah yang melahirkan Din Ilahi sebagai perwujudan sinkretisme keagamaan.

Konsep Din Ilahi sebagai sinkretisme keagamaan tidak banyak dibahas dalam berbagai literatur baik buku atau jurnal. Beberapa kajian terdahulu hanya sedikit menyinggung eksistensi Din Ilahi sebagai suatu kebijakan paling populer dari Sultan Akbar. Kajian dan penelitian mengenai Din Ilahi masih sedikit terbatas dan kebanyakan sumber juga membahas imperium dinasti Mughal, masa kejayaan, peninggalan (Taj Mahal) dan Islamisasi di India. Hal ini senada dengan pendapat [Anwarsyah \(2014\)](#) yang menjelaskan bahwa sejarawan India dan Barat sangat sedikit yang menyinggung mengenai konsep Din Ilahi, melainkan cenderung membahas mengenai struktur pemerintahan, ekonomi, militer, sistem pajak, infrastruktur dan seni arsitektur. Sebagaimana salah satu karya sejarawan barat yakni John. F. Richard yang merupakan seorang professor sejarah dari Universitas Duke, meneliti banyak mengenai India dan beberapa dinasti yang berkuasa. Dalam bukunya, [Richards \(1995\)](#) lebih membahas terkait struktur dan sistem pemerintahan dinasti Mughal dan proses ekspansi wilayah. Selain itu juga terdapat karya [Eraly \(2005\)](#) yang membahas terkait masa keemasan dinasti Mughal, jejak peradaban dinasti Mughal dan peninggalannya. Terkait konsep Din Ilahi masih sedikit mendapat sentuhan dari buku ini.

Terlepas dari itu beberapa studi juga ada yang memberikan sejumlah penelitian mengenai Din Ilahi. [Roychoudury \(1941\)](#) memberikan banyak potret persoalan mengenai konsep Din Ilahi yang kemudian menjadi suatu kontroversi. Din Ilahi sebagai suatu pemikiran sinkretis sangat menarik untuk dikaji. Hal ini dikarenakan konsep sinkretism dan pluralism sangat erat kaitannya dengan kehidupan, terutama bagi negara-negara di Asia yang memiliki banyak keberagaman agama dan kepercayaan. Dengan berbagai persoalan diatas mendorong urgensi penelitian ini dilakukan. Artikel ini mencoba memberikan harmonisasi baru dalam historiografi sejarah peradaban Islam di India khususnya dalam Konsep Din Ilahi pada masa dinasti Mughal 1560-1605. Artikel ini bertujuan membahas doktrin Din Ilahi sebagai perwujudan sikretisme keagamaan yang kemudian menjadi ajaran kontroversial dari Sultan Jalaludin Akbar.

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kajian sejarah dengan mengacu terhadap kesesuaian tema kajian. Berbagai sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Buku, Jurnal, Artikel ilmiah dan sumber pendukung lainnya. Selain itu, metode penelitian ini juga menggunakan pendekatan biografi tokoh yang dalam hal ini berfokus pada tokoh Sultan Jalaludin Akbar. Hal ini dikarenakan munculnya konsep Din Ilahi tidak terlepas dari kiprah dan jati diri keagamaan Sultan Jalaludin Akbar. Dengan menggunakan pendekatan biografi, penelitian ini dapat menelisik lebih dalam mengenai sebab akibat, pengaruh serta pandangan dari Sultan Akbar terkait Konsep Din Ilahi yang digagasnya. Pendekatan biografi dan kajian sejarah merupakan konteks naratif yang saling mengisi ([Sari 2021](#)). Penelitian sejarah berfungsi untuk menguatkan dan mencari kebenaran atau fakta dalam biografi. Pada metode penelitian sejarah terdapat empat tahapan dalam metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Tahapan pertama yaitu heuristik dengan mengumpulkan berbagai literatur dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian. Sumber yang dikumpulkan meliputi buku-buku yang relevan seperti buku karya Abraham Eraly yang berjudul “*The Mughal Throne: The Saga of India’s Great Emperors*”. Buku ini banyak membahas bagaimana kejayaan dari Imperium Mughal yang tentunya menyinggung pemerintahan Sultan Akbar dari berbagai aspek. Selain itu sumber yang dikumpulkan juga dari artikel jurnal yang secara konkrit membahas mengenai kontroversi Din Ilahi. Disamping itu juga terdapat sumber-sumber pendukung lainnya seperti laporan hasil penelitian dan artikel ilmiah terkait imperium Mughal dibawah kepemimpinan Sultan Akbar.

Tahapan yang kedua yaitu kritik sumber. Pada tahapan ini sumber dan data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan proses kritik dengan mengkaji secara *internal criticism*

dan *external criticism* demi memperoleh data yang orisinal dan kredibel yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian (Isnaini 2021). Tahapan yang ketiga yaitu interpretasi. Pada tahapan ini data-data yang telah melalui tahap kritik sumber kemudian diolah, diseleksi dan disusun menjadi rangkaian fakta-fakta dalam penelitian (Agustina dkk. 2020). Tahapan yang keempat yaitu historiografi dimana pada tahap ini semua data yang telah melewati tiga tahapan sebelumnya diuraikan dan ditulis kembali menjadi narasi sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinasti Mughal Masa Pemerintahan Sultan Jalaluddin Akbar 1560-1605

Berbicara mengenai peradaban Islam di India tentunya tidak terlepas dari eksistensi dinasti Mughal yang membawa sejumlah perubahan besar dalam peradaban Islam (Isnaini 2021; Achmad dan Nurcholis 2016). Sebelum terbentuk peradaban tersebut India mengalami proses Islamisasi yang cukup panjang yang dimulai sekitar pada abad 1 H atau 622 M melalui jalur perdagangan. Lambat laun terbentuklah kelompok-kelompok Islam dan tumbuh semakin besar hingga membuat suatu imperium besar. Dinasti Mughal merupakan dinasti Islam terbesar di India. Dibawah kekuasaan dinasti Mughal, Islam sangat berkembang dan membuat suatu kemajuan dalam peradaban. Dinasti Mughal mencapai kejayaan pada masa Sultan Jalaludin Akbar. Sultan Akbar memiliki nama asli Abul Fath Jalaluddin Akbar yang merupakan putra dari Nashiruddin Humayun (raja kedua dinasti Mughal) dan Hamida Bano (Agustina dkk. 2020; Iftikhar 2019). Sultan Akbar lahir di Sindh pada 1542 (Isnaini 2021).

Setelah meninggalnya Nashiruddin Humayun, tampuk pemerintahan digantikan kepada Sultan Akbar yang pada saat itu masih berusia 14 tahun. Di usianya yang masih muda, Sultan Akbar dibantu Bairam Khan dalam mengendalikan roda pemerintahan. Bairam Khan merupakan seorang wazir yang sangat berpengaruh di lingkungan istana. Bairam Khan merupakan seorang muslim yang beraliran Syiah. Setelah Sultan Akbar dewasa dan mampu untuk mengambil alih kekuasaannya, hal yang pertama kali dilakukan yaitu menyingkirkan Bairam Khan (Thohir 2004). Hal ini dilakukan karena Bairam Khan terlalu memaksakan paham Syiah dalam pemerintahannya. Sultan Akbar memiliki dasar kebebasan beragama yang kuat dan tidak menyukai pemaksaan dalam hal keyakinan (Agustina dkk. 2020). Inilah alasan Sultan Akbar memecat Bairam Khan yang juga dianggap dapat menghambat setiap kebijakannya. Akibat pemecatan itu, Bairam Khan melakukan pemberontakan yang akhirnya dapat dihentikan oleh pasukan Sultan Akbar. Atas dasar balas budi, Sultan Akbar tidak menjatuhkan hukuman terhadap Bairam Khan. Namun pada akhirnya Bairam Khan harus meninggal ditangan seorang Afghan (Bangsa Hemu) yang masih dendam dan menuntut balas atas kematian ayahnya karena kebijakan Bairam Khan saat memerintah menggantikan Sultan Akbar (Mahmudunnasir 1981).

Sultan Akbar dalam bahtera kekuasaannya seringkali mengalami berbagai pertentangan diantaranya pemberontakan (Anwarsyah 2014). Pemberontakan yang terjadi merupakan sisa-sisa dari pemberontakan sebelumnya sebagaimana pemberontakan yang dilakukan oleh Sher Khan Shah yang berkuasa di Punjab (Yatim 2011). Hal ini merupakan suatu tantangan dari Sultan Akbar dalam memberantas setiap pemberontakan demi stabilitas negara. Melihat persoalan tersebut Sultan Akbar memperkuat pertahanan dan keamanan negara. Sultan Akbar menganggap bahwa suatu kekuatan pemerintahan terletak pada kekuatan administrasi, politik, kegamaan dan pertahanan keamanan (Sihombing 1953). Dalam hal memberantas pemberontakan, tidak ada toleransi yang diberlakukan. Berbeda jauh dengan strategi perluasan wilayah yang tidak menggunakan militer, melainkan melalui strategi toleransi dan pendekatan sosial.

Masa keemasan Dinasti Mughal tidak terlepas pada sejumlah pemikiran dan

kebijakan Sultan Akbar yang sangat reformis dan revolusioner. Sultan Akbar mampu menguasai medan dan menangkap berbagai persoalan yang dari pemerintahan sebelumnya tidak pernah menemui keberhasilan. Setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu dengan menggunakan strategi yang matang. Sultan Akbar menggunakan pendekatan-pendekatan yang harmonis terhadap rakyatnya yakni dengan berbaur bersama. Kebijakan-kebijakan yang dibuat senantiasa berdasarkan pada kondisi sosio kultural masyarakat. Hal ini dikarenakan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan mendapat simpati dan dukungan politis dari masyarakat dengan membuat kebijakan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan unsur kepercayaan, sosial dan budaya. Kebijakan ini merupakan bentuk analisa yang sangat dalam dari Sultan Akbar untuk membuat seluruh kebijakannya dapat diterima dan mampu menyatukan tanah Hindustan dibawah imperium Mughal. Tentunya kebijakan ini juga didasari pada analisis berbagai kegagalan yang dirasakan oleh penguasa-penguasa sebelumnya. Sultan Akbar menyadari bahwa penguasa sebelum dirinya hanya fokus pada legitimasi kekuasaan dan ekspansi wilayah yang tidak didasarkan pada kajian masyarakat (Agustina dkk. 2020). Sehingga dengan upaya apapun tetap tidak dapat menyatukan seluruh tanah Hindustan.

Dinasti Mughal dibawah kepemimpinan Sultan Akbar memiliki perubahan konsep pemikiran dalam menjalankan pemerintahan. Sultan Akbar memiliki pemahaman bahwa setiap penyatuan wilayah tidak didasarkan pada kekerasan militer yang mengakibatkan banyak pertumpahan darah. Penyatuan melalui kekerasan dianggapnya sebagai asap baru dalam setiap praktik pemberontakan yang akan terjadi. Kekerasan akan menyebabkan banyak perselisihan, hilangnya nyawa dan harta benda serta dendam baru yang akan terus hidup bahkan terwariskan. Kekerasan dalam penyatuan ini juga merupakan suatu faktor kegagalan pemerintahan sebelumnya yang dinilai tidak mendapatkan simpati masyarakat serta mengundang banyaknya pemberontakan yang akhirnya juga dirasakan oleh Sultan Akbar sebagai sisa-sisa pemberontakan dari pemerintahan sebelumnya. Sultan Akbar meyakini bahwa penyatuan tanah Hindustan harus melalui pendekatan harmonis terhadap masyarakat (Kutlutürk 2016). Hal ini dikarenakan India yang pada dasarnya merupakan wilayah dengan multikultural. Setiap agama dan kepercayaan, etnis, tradisi dan budaya tentunya memiliki pemahaman yang berbeda. Dengan demikian Sultan Akbar mengubah strategi perluasan wilayahnya dari militeristik menjadi strategi toleransi (Agustina dkk. 2020).

Selain itu Sultan Akbar juga tidak memaksakan rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Dalam strategi dakwahnya Sultan Akbar tidak pernah menggunakan pedang atau kekerasan. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Islam merupakan pilihan dan tidak ada unsur paksaan didalamnya (Roychundhury 1941). Sultan Akbar memiliki pandangan bahwa semua agama memiliki ajaran yang sama dengan mengacu kepada nilai kebenaran (Eraly 2005). Pandangan-pandangan seperti inilah yang menjadi dasar toleransi dari Sultan Akbar sehingga dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan khususnya dalam kebijakan agama pasti mengandung praktik toleransi yang sangat kuat. Hal inilah yang kemudian juga menjadi inovasi dan prestasi gemilang Sultan Akbar dalam menyatukan tanah Hindustan dalam kesatuan sosial politik yang belum pernah dilakukan oleh para penguasa sebelumnya di India (Anwarsyah 2014).

Kebijakan Sultan Akbar dalam memajukan dinasti Mughal terekam dalam bidang militer, pendidikan, administrasi atau pemerintahan, arsitektur bangunan, agama, seni dan sastra (Anwarsyah 2014). Namun dari berbagai kebijakan dan prestasi Sultan Akbar terdapat satu kebijakan yang paling fenomenal yaitu terbentuknya konsep pemikiran Din Ilahi yang kemudian menjadi suatu doktrin keagamaan. Pemikiran tersebut merupakan bentuk dari politik *Sulh-I Kubl* (politik toleransi) yang tidak membedakan agama, kepercayaan, suku, ras,

adat istiadat dan budaya (Agustina dkk. 2020). *Sulb-I Kubl* Sultan Akbar mengedepankan konsep kesetaraan dengan tidak memandang latar belakang sosial dan agama (Thohir 2004). Lebih lanjut Feme (2014) menjelaskan bahwa misi utama dari *Sulb-I Kubl* terletak pada cita-cita persatuan dan kedamaian universal masyarakat India. Politik *Sulb-I Kubl* ini kemudian melatarbelakangi lahirnya konsep Din Ilahi sebagai alat pemersatu India yang dibalut dengan toleransi beragama. Di satu sisi munculnya Din Ilahi menjadi satu inovasi dan prestasi besar Sultan Akbar dalam menyatukan India berdasarkan kesatuan sosial politik. Namun disisi lain, Din Ilahi secara teologis dianggap merusak dan menciderai ajaran Islam. Sultan Akbar juga dinilai telah keluar dari ajaran dan prinsip Islam dengan mencampuradukkan berbagai agama demi kepentingan politis (Anwarsyah 2014).

Lahirnya Konsep Din Ilahi

Din Ilahi sebagai media toleransi dan politik Sultan Akbar tentunya tidak terlepas dari latar belakang kegamaannya. Pada dasarnya Sultan Akbar merupakan muslim yang taat kepada ajaran Islam. Hal ini dibuktikan dengan sikap takwa dan kepribadian Sultan Akbar sebagai seorang muslim. Ketakwaan Sultan Akbar tercermin dari taatnya menunaikan ibadah seperti sholat lima waktu dengan berjamaah, mengumandangkan adzan dan bahkan membersihkan tempat ibadah (Sokah 1994). Selain itu Sultan Akbar juga sangat menghormati pemuka agama khususnya dalam kalangan istana yaitu Makhdum al-Mulk dan Syekh Abdul Nabi. Kedua ulama ini memiliki sejumlah pengaruh besar khususnya dalam keterlibatan diskusi-diskusi kegamaan dengan Sultan Akbar.

Pemikiran sinkretis Sultan Akbar dimulai dari diskusi-diskusi keagamaan dengan para ulama dan filsuf. Namun para filsuf disini sangat jauh dari pandangan dan perspektif sufisme yang sebenarnya. Mereka memiliki pemikiran yang liberal dan masih terikat dengan kehidupan duniawi (Kutlutürk 2016). Salah satu pemikiran yang liberal yaitu menganggap bahwa sujud kepada raja sama artinya dengan sujud kepada Allah serta setiap agama pada dasarnya sama sehingga manusia bebas menggunakan cara apapun dalam mengangugkan Tuhan. Menurut Kutlutürk (2016), ajaran sufi yang sangat liberal ini terpengaruh dari konsepsi pemikiran *wahdatu-I wujud* (kesatuan keberadaan) yang merusak esensi ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadist. Pemikiran sufistik ini sebenarnya bertentangan dengan konstruksi pikiran istana yang menginginkan Sultan Akbar harus berlandaskan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum dan penetapan kebijakan. Hal ini dikarenakan perbedaan paham aliran yang berseberangan dari kalangan istana yang menganut paham sunni dan para sufi yang beraliran syiah (Kutlutürk 2016). Pemikiran yang ditawarkan oleh kaum sufi lebih mengarah kepada pemikiran-pemikiran liberal yang kemudian mempengaruhi konstruksi pemikiran Sultan Akbar dalam memandang agama dan keberagaman.

Selanjutnya Sultan Akbar mendirikan forum diskusi yang diberi nama *ibadat khana* tahun 1575 di Fatihpur Sikr. *Ibadat Khana* merupakan forum diskusi keagamaan yang dibangun Sultan Akbar untuk memecahkan persoalan kehidupan dan pemerintahan dengan berlandaskan ajaran agama (Sokah 1994). Pembangunan *Ibadat Khana* tentunya didasarkan pada kebiasaan Sultan Akbar yang sering terlibat diskusi keagamaan sejak waktu kecil. *Ibadat Khana* diadakan setiap malam kamis dan dihadiri oleh berbagai kalangan ulama termasuk Makhdum al-Mulk dan Syekh Abdul Nabi (Isnaini 2021). Namun diskusi dalam *Ibadat Khana* seringkali mengalami persoalan dan perdebatan yang rumit sehingga satu sama lain saling memojokkan dan merasa paling benar. Kejadian ini memicu kekecewaan Sultan Akbar yang kerap kali disuguhkan perdebatan yang sama sekali tidak menemukan hasil dan solusi. Sultan Akbar menilai bahwa cara berfikir dari ulama sunni masih kaku dalam wacana dan diskursus keagamaan (Ali 1981).

Kekecewaan Sultan Akbar semakin memuncak ketika Syekh Abdul Nabi memberikan vonis hukuman mati terhadap seorang Brahmana yang dicurigai telah mengambil peralatan masjid dan menghina Nabi Muhammad SAW. Sultan Akbar menilai bahwa keputusan vonis hukuman mati dari Syekh Abdul Nabi sangat tidak tepat. Vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada Brahmana akan mengandung kekecewaan dan hilangnya simpati umat Hindu. Selain itu, pemikiran Syekh Abdul Nabi yang juga kerap kali berseteru dengan Makhdum al-Mulk dinilai tidak memiliki unsur toleransi terhadap keyakinan lain dan tetap teguh terhadap satu kebenaran. Hal ini bertolak belakang dengan keyakinan Sultan Akbar yang meyakini bahwa kebenaran terletak pada siapa saja dan tidak mungkin kebenaran hanya ada pada satu keyakinan (Rizvi 1999). Dari hal itu Sultan Akbar mengundang agamawan lain seperti Hindu, Budha, Kristen dan Zoroaster untuk berdiskusi masalah keagamaan dan mencari penyeimbang agar tercipta fleksibilitas berfikir. Dari diskusi-diskusi Sultan Akbar serta pemikiran yang liberal mendorong lahirnya suatu gerakan atau konsep sinkretisme agama yang sangat besar yang disebut dengan Din Ilahi.

Lahirnya Din Ilahi juga tidak terlepas dari pemahaman Sultan Akbar sebagai *kehalifatullah* (wakil Allah) dalam sistem pemerintahan dinasti Mughal. Pengakuan Sultan Akbar sebagai wakil Allah sejatinya bukan merupakan hal baru dalam sistem pemerintahan dan perpolitikan Islam. Hal ini telah ada jauh sebelum dinasti Mughal berdiri dan bahkan telah ada sejak awal berdirinya dinasti Umayyah. Dalam sistem pemerintahan dinasti Umayyah terlihat jelas terdapat konversi konsep dari *kehalifaturrasul* menjadi *kehalifatullah* (Khoiri 2021). Tentunya hal ini dapat dibuktikan dari pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz (Khoiri 2021). Pada masa Khalifah Muawiyah bin Abis Sufyan yang memerintah pada tahun 661-680 M, kekuasaan sepenuhnya ditangan khalifah dan rakyat harus patuh serta taat kepada khalifah dimana Muawiyah mengartikan khalifah sebagai wakil tuhan yang wajib dipatuhi dan yang menentanginya termasuk kafir (Khairuddin 2017). Konversi makna *kehalifaturrasul* menjadi *kehalifatullah* juga terjadi pada dinasti selanjutnya yakni dinasti Abbasiyah. Khalifah Ja'far Al-Mansur yang pada saat itu menjadi pemimpin kedua dari dinasti Abbasiyah menyebutkan dirinya sebagai pemimpin yang diutus oleh Allah dan merupakan bayangan Allah dalam memberikan petunjuk dan menuntun rakyat ke jalan yang benar (Khoiri 2021).

Pemahaman mengenai *kehalifatullah* jika dilihat sekilas nampaknya memiliki kesamaan dengan konsepsi khalifah menurut Sultan Akbar. Keduanya mengindikasikan bahwa pemimpin merupakan wakil Allah yang memiliki otoritas kuat dalam memerintah dan mengatur rakyatnya sesuai dengan kehendaknya. Namun terdapat perbedaan yang signifikan dimana dalam motivasi dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah adalah perihal perluasan kekuasaan Islam. Sedangkan motivasi Sultan Akbar yakni penyatuan India dari segala unsur agama, kepercayaan dan sosio-kultural masyarakat. Dari hal itulah output yang dihasilkan juga berbeda yakni dengan menghasilkan konsep Din Ilahi yang menjadi sarana toleransi antar umat beragama.

Din Ilahi sebagai gerakan toleransi beragama lebih banyak mendapat dukungan dan perhatian dari masyarakat Hindu. Menurut Anwarsyah (2014) masyarakat Hindu sangat tertarik dengan gerakan toleransi beragama yang tidak membeda-bedakan setiap orang. Hal ini dikarenakan dalam ajaran Hindu terdapat suatu paham kasta yang menjadikan sebagian umat Hindu khususnya yang berkasta rendah merasa terdiskriminasi. Dengan toleransi beragama Sultan Akbar memiliki keyakinan bahwa penyebaran agama Islam akan sangat mudah diterima apabila telah mendapat simpati dan hati masyarakat. Dengan demikian perkembangan Islam di India dapat berkembang dengan pesat. Sebagai langkah awal Sultan Akbar kemudian menikahi wanita Hindu sebagai bentuk toleransi beragama dan upaya penyatuan India dibawah kekuasaan Mughal. Sultan Akbar juga mengizinkan adanya ajaran

dan praktik ibadah agama lain dengan sebebas-bebasnya. Hal ini didasarkan pada keyakinannya bahwa untuk menjamin suatu kedamaian bagi masyarakat India, Islam harus bersedia menerima berbagai unsur agama lain seperti Hindu, Kristen dan Zoroaster (Amin 1999). Kebijakan yang sangat berani ini kemudian banyak mendapat kritik dan tantangan khususnya bagi kalangan ahli fikih dan umat Islam.

Kontroversi Doktrin Din Ilahi

Din Ilahi merupakan suatu gerakan dan gagasan Sultan Akbar dalam kebijakan keagamaan. Din Ilahi memiliki anggota yang tergabung didalamnya dan memiliki ritual serta ciri khas tertentu. Sultan Akbar hanya menerima anggota atau murid baru Din Ilahi pada hari ahad saja. Selain itu setiap anggota Din Ilahi memiliki karakteristik yang mencolok ketika saling bertemu. Mereka harus mengucapkan “*Allahu Akbar*” dan dijawab “*Jalla Jallaluhu*” (Kutlutürk 2016). Mereka juga tidak diperkenankan untuk memakan daging, mendekati daging, serta mengunjungi tempat penjual daging. Hal ini dikarenakan suatu bentuk penghormatan kepada umat Hindu. Selain itu anggota yang tergabung dalam Din Ilahi tidak diperbolehkan untuk menggauli wanita mandul, hamil dan wanita yang belum baligh (Sokah 1994).

Gagasan Din Ilahi muncul dan dideklarasikan pada tahun 1582 (Siddique 2011). Selama awal terbentuknya Din Ilahi dinilai mengandung wacana negatif yang sangat kuat mengenai Islam. Hal ini terbukti dari ajaran dan pemikiran sinkretis yang mewarnai terbentuknya Din Ilahi. Menurut Badauni dalam Kutlutürk (2016) beberapa orang terkemuka pada waktu itu mengatakan bahwa Islam merupakan agama yang belum sah dan final sampai akhir jaman. Periode seribu tahun setelah Rasulullah SAW wafat, merupakan periode kelanjutan iman. Sedangkan saat ini periode tersebut telah selesai sehingga Islam dapat dikembangkan dengan keimanan sendiri. Deklarasi Din Ilahi dikhususkan untuk membebaskan dan memisahkan diri dari ajaran Islam yang tradisional dan imitatif (Rizvi 1975). Hal inilah yang kemudian menjadikan Sultan Akbar meninggalkan taqlid ajaran Islam dan merusak sebagian esensi nilai-nilai dalam Islam.

Para anggota atau pengikut Din Ilahi Sultan Akbar disebut *Illabias*. Untuk menjadi *Illabias* diharuskan untuk menandatangani kontrak yang telah disepakati dalam deklarasi Din Ilahi. Sepertihalnya tata cara masuk Islam, calon *Illabias* juga memiliki ritual sendiri yakni dengan mengucapkan “Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Akbar adalah khalifah Tuhan” sebagai bentuk ritualnya (Kutlutürk 2016). Namun terdapat hal yang menarik bahwasanya ritual bergabung dalam Din Ilahi ini hanya terbatas dan disaksikan oleh Sultan Akbar sendiri. Menurut Siddique (2011), hal ini dikarenakan ritual ini berpotensi untuk membuat kontroversi besar di kalangan umat Islam. Sehingga hal ini dilakukan secara terbatas. Dari hal tersebut telah jelas betapa melencengnya gerakan Din Ilahi yang dideklarasikan sebagai usaha penyatuan dan perdamaian umat beragama di India.

Jika dikaji lebih jauh lagi, Din Ilahi sebagai gagasan sinkretis telah melenceng dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa ayat Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. yang sangat jelas mengatakan bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang benar dan Al-Quran merupakan kitab suci yang harus diikuti dan menjadi pedoman hidup manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 85 yang berbunyi “Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah diterima daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi”. Berkenaan dengan ayat ini, Mashudi (2020) menyebutkan bahwa dalam tafsir Al-Muyassir dikatakan barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam yang perwujudannya seperti meyakini keesaan Allah, tunduk dan patuh terhadap ajarannya serta mencintai ajaran tersebut, maka tidak akan diterima agama tersebut dan orang-orang yang demikian itu kelak

di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Din Ilahi sebagai sinkretisme keagamaan memandang bahwa agama adalah suatu hal yang relatif dan kedudukannya sama benar. Pandangan seperti ini tentunya merupakan suatu kesesatan dan bentuk pelucutan akidah yang paling fundamental dalam prinsip Islam.

Akhir pemerintahan Sultan Akbar diwarnai dengan gejolak politik dan kegelisahan dalam pemerintahannya. Kebijakan toleransi Din Ilahi mendapat berbagai kritik dan tantangan dari sebagian besar kalangan muslim. Din Ilahi yang digagas tidak sepenuhnya dapat dijalankan dengan baik. Konsep toleransi ini justru membuat Sultan Akbar semakin jauh dari ajaran Islam ortodox dan dinilai lebih dekat dengan kalangan Hindu. Hal inilah yang kemudian juga dimanfaatkan oleh sebagian kalangan Hindu yang ingin melepaskan diri dari imperium Mughal dengan mengadu domba dan menyebarkan isu bahwa Sultan Akbar lebih berpihak pada umat Hindu. Akibatnya Din Ilahi semakin ditentang terutama dalam kalangan istana. Puncaknya yaitu banyaknya pembelot dan pemberontak yang salah satunya dilakukan oleh putranya yaitu Pangeran Salim yang berambisi untuk menduduki tahta dinasti Mughal. Pangeran Salim atau Sultan Jahangir memiliki watak pemahaman berbeda dengan Sultan Akbar dalam konsep toleransi. Sultan Jahangir menginginkan dinasti Mughal kembali pada ajaran Islam yang Kaffah dan tidak mencampuradukkan dengan ajaran Hindu, Kristen, Budha dan Zoroaster.

PENUTUP

Sultan Akbar merupakan seorang penguasa dinasti Mughal yang memiliki pemikiran reformis dan liberalis. Pemikiran tersebut juga merupakan pengaruh dari berbagai kalangan seperti ulama, sufi, pendeta dan brahmana. Dibawah kepemimpinannya, dinasti Mughal mencapai sukseksi kejayaan dan perkembangan Islam yang pesat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkannya selalu dengan bentuk pendekatan harmonis kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan India merupakan suatu wilayah dengan beragam etnis, agama dan kepercayaannya. Salah satu kebijakan yang paling kontroversial dari Sultan Akbar yaitu gagasan Din Ilahi sebagai bentuk penyatuan India dalam satu kesatuan sosial politik dibawah kekuasaan Mughal. Sinkretisme Din Ilahi pada dasarnya telah menyalahi ajaran Islam. Politik dan toleransi dalam Din Ilahi justru tidak dapat menyatukan seluruh pihak. Ajaran Din Ilahi dinilai merusak esensi ajaran Agama Islam. Sultan Akbar sebagai penggagas Din Ilahi juga dianggap keluar dari taqlid Islam yang kaffah dengan mencampuradukkan Islam dengan agama lainnya. Din Ilahi yang menjadi suatu bentuk politik Sultan Akbar kemudian mendapat banyak tantangan dan kritikan dari kalangan umat Islam karena bentuk ajarannya. Hal ini kemudian menjadi suatu problematika dalam pemerintahan Sultan Akbar yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh pihak musuh untuk melemahkan Sultan Akbar.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Noor, dan Nanang Nurcholis. 2016. "States and Local Legal Cultures in Medieval Islam: A Comparative Study of Akbar's Mughal Rule and Sultan Agung's Mataram in 16th and 17th Century." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 54 (1): 33–57. <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.541.33-57>.
- Agustina, Sari, Sumarjono, Sumarno, dan Ahmad Ryan Pratama. 2020. "Jalalludin Muhammad Akbar's Policy in India 1556-1605 C." *Jurnal Historica* 4 (1): 124–37.
- Ali, S.A. 1981. *Islamic History and Culture: Islamic Culture under the Moghuls*. Delhi: Amar Prakashan.
- Amin, H.A. 1999. *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Anwarsyah, Nur. 2014. "Din Ilahi: Pemikiran Sinkretis Keagamaan Sultan Akbar The Great (1556-1605)." Dalam *Seri Sejarah Peradaban Islam: Imperium Mughal India 1526-1858*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Ekopriyono, Andi. 2005. *The Spirit of Pluralisme*. Jakarta: Gramedia.
- Eraly, Abraham. 2005. *The Mughal Throne: The Saga of India's Great Emperors*. London: Phoenix Publisher.
- Femeo, Tadd. 2014. *Enlightenment and Violence: Modernity and Nation-Making*. New Delhi: SAGE Publications.
- Iftikhar, Dr Rukhsana. 2019. "Genesis of Muslim Culture and Co-Existence in Mughal Era." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 9 (1): 119–30. <https://doi.org/10.32350/jitc.91.08>.
- Isnaini, Syarifah. 2021. "Kebijakan Politik Keagamaan Sultan Akbar Agung dan Abul Muzaffar Muhiuddin Aurangzeb." *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 5 (2): 49–60. <https://doi.org/10.29300/ttjksi.v5i2.3424>.
- Khairuddin. 2017. "Kebijakan Politik Muawiyah." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 10 (1): 161–81. <https://doi.org/10.24014/af.v10i1.3840>.
- Khoiri, Miftahul. 2021. "Sejarah Konversi Khalifah Al-Rasul Menjadi Khalifatullah." *El Tarikh : Journal of History, Culture and Islamic Civilization* 2 (1): 1–10. <https://doi.org/10.24042/jhcc.v2i1.7440>.
- Kutlutürk, Cemil. 2016. "A Critical Analysis of Akbar's Religious Policy: Din-i Ilahi." *International Relations and Diplomacy* 4 (6): 407–17. <https://doi.org/10.17265/2328-2134/2016.06.005>.
- Mahmudunnasir, Syed. 1981. *Islam, Its concepts and history*. New Delhi: Kitab Bhavan.
- Mashudi, Kojin. 2020. *Telaah Tafsir Al-Muyassar*. Vol. 1. Malang: Intelegensia Media.
- Richards, John. F. 1995. *The New Cambridge History of India: The Mughal Empire*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rizvi, Sayyid Athar Abbas. 1975. *Religious and Intellectual History of The Muslims in Akbar's Reign with Special Reference to Abu'l Faẓl (1556-1605)*. Delhi: Munshiram Monoharlal Publisher.
- . 1999. *Akbar and His Age*. New Delhi: Northern Book Centre.
- Roychundhury, Makhanlah. 1941. *The Din Ilahi or Religion of Akbar*. India: University of Calcutta.
- Sari, Yunita. 2021. "Peran Dari Biografi Dalam Sejarah Intelektual." *Jurnal Pustaka Ilmiah* 7 (1): 54–63. <https://doi.org/10.20961/jpi.v7i1.50940>.
- Siddique, A.F.M. Abu Bakar. 2011. *Shaikh Ahmad Sirhindi (Rb) and His Reforms*. Dhaka: Research & Publication Khanka-e Mujaddidia.
- Sihombing, O.D.P. 1953. *India: Sejarah dan Kebudayaanannya*. Bandung: W Van Hoeve.
- Singgih, E.G. 2000. *Berteologi dalam Konteks*. Yogyakarta: Kanisius.

- Sokah, Umar Asasuddin. 1994. *Din –e Ilahi: Kontroversi Keberagaman Akbar (India 1560-1605 M)*. Yogyakarta: Ittaqa Press.
- Thohir, Ajid. 2004. *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yatim, Badri. 2011. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.